



Gubernur Basuki Pertanyakan BPK

BPK: Pemeriksaan Tak untuk Ungkap Kecurangan

JAKARTA, KOMPAS — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan sejumlah saran Badan Pemeriksa Keuangan atas hasil pemeriksaan keuangan tahun 2014. Saran dinilai tidak relevan. Namun, BPK menyatakan opininya final sesuai standar audit keuangan dan menjamin tidak ada intervensi politik.

Basuki mencontohkan pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras yang mendapat sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena dianggap kelebihan bayar Rp 191 miliar. BPK menghendaki pembelian lahan dengan model taksiran harga (*appraisal*).

Basuki menilai, temuan itu aneh. Sebab, nilai jual obyek pajak (NJOP) yang menjadi dasar pembayaran lebih rendah dari harga taksiran. "Hasil audit BPK bilang kemahalan. Kemahalan dibandingkan apa?" kata Basuki di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/7).

Saran agar RS Sumber Waras mengembalikan selisih NJOP dianggap tidak mudah. Dia bahkan tak yakin rumah sakit itu bersedia. "Itu artinya, kami harus membatalkan transaksi, dan kami bisa kehilangan tanah. Menurut BPK, DKI sudah banyak tanah, buat apa beli tanah lagi. Sejak kapan BPK mengatur pembelian tanah?" ujar Basuki.

Menurut Basuki, dirinya tidak mempermasalahkan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) atau wajar dengan pengecualian (WDP). Menurut dia, seharusnya DKI Jakarta justru mendapatkan opini *disclaimer* (tidak memberikan pendapat) sejak pemerintahan sebelumnya.

"Saya bilang ke BPK, coba lihat Banten. Dapat WTP, kan? Padahal, ada kasus pengadaan alat kesehatan, gubernurnya juga

diproses hukum. Jadi BPK auditnya bagaimana?" katanya.

"Rakyat itu tidak peduli mau WTP, WDP, atau *disclaimer*. Bagi mereka, yang penting sembako murah, transportasi murah, punya rumah, kesehatan dan pendidikan beres," ujarnya.

Kecurangan

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional BPK Yudi Ramdan Budiman mengatakan, BPK tidak pilih kasih dan tidak membandingkan dengan daerah lain karena karakteristik dan lingkungan berbeda meski standar pemeriksaan keuangan sama.

Menurut Yudi, pemeriksaan keuangan oleh BPK tidak dirancang untuk mengungkap kecurangan. BPK hanya menilai dari kewajaran laporan keuangan terkait prosedur pencatatan, pembukuan, dan pelaporan transaksi keuangan sesuai standar.

Seperti pada laporan keuangan tahun 2013, BPK memberikan opini WDP terhadap laporan keuangan DKI Jakarta tahun 2014. Pengecualian itu disebabkan permasalahan tahun 2013 ditindaklanjuti tuntas pada tahun 2014.

Yudi menyebutkan, pengecualian itu, antara lain, soal pengendalian dan pengamanan aset senilai Rp 3,5 triliun, permasalahan piutang pajak bumi dan bangunan, serta piutang pajak kendaraan bermotor yang tidak

dapat ditelusuri rinciannya, serta kelemahan sistem pengendalian belanja modal atas 85 paket pengadaan barang.

Permasalahan lain yang disebut BPK dalam laporan adalah kerja sama pemanfaatan aset tanah seluas 30,88 hektar, pembelian tanah untuk rumah sakit di Jakarta Barat, penetapan nilai penyertaan modal dan penyerahan aset ke badan usaha milik daerah, penanggulangan kerusakan jalan, kelebihan pembayaran biaya premi asuransi kesehatan, serta administrasi pengelolaan biaya operasional pendidikan.

Terkait tanah RS Sumber Waras, lanjut Yudi, BPK menyoroti proses pembeliannya. Awal prosesnya memang dimulai pemerintah periode sebelumnya, tetapi biayanya dianggarkan pada APBD 2014 yang menjadi obyek pemeriksaan BPK.

Yudi menjamin hasil pemeriksaan BPK independen. "BPK punya standar pemeriksaan ketat dan melalui kontrol kualitas yang diatur dalam standar pemeriksaan keuangan negara," ujarnya.

Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK dan memberikan jawaban atau penjelasan selambatnya 60 hari setelah laporan diterima. Pada kesempatan itu, Pemprov DKI berhak memberi penjelasan dan menjawab temuan BPK. (FRO/MKN)



Lihat Video Terkait
"Pembelian Lahan RS
Sumber Waras Dinilai
Janggal"
di kompasprint.com/vod/pembelianlahantakwajar